



**KEPUTUSAN GUBERNUR RIAU
NOMOR:Kpts : 020/ 1/2026**

**TENTANG
DAFTAR INFORMASI PUBLIK WAJIB DI SEDIAKAN DI LINGKUNGAN DINAS
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI RIAU TAHUN 2026**

GUBERNUR RIAU

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Ketentuan Peraturan Komisi Informasi Pasal 21 Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik, bahwa setiap Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik yang tersedia setiap saat yang didalamnya terdapat Daftar Informasi Publik;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 21 Ayat 2, setiap Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik yang tersedia setiap saat yang didalamnya terdapat Daftar Informasi Publik yang memuat nomor, ringkasan isi informasi, pejabat atau unit/satuan kerja yang menguasai informasi, penanggungjawab pembuatan atau penertiban informasi, waktu dan tempat pembuatan informasi, bentuk informasi yang tersedia, jangka waktu penyimpanan atau retensi arsip;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Riau tentang Daftar Informasi Publik Wajib Di Sediakan Di Lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Provinsi Riau Tahun 2026;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan; Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSRf sesuai dengan Undang Undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, tandatangan secara elektronik memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah. Keabsahan surat elektronik ini dapat dibuktikan di <https://tte.kominfo.go.id/>

5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 03 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
8. Peraturan Gubernur Riau Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau;
9. Keputusan Gubernur Riau Nomor Kpts.778/IV/2 020 Tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Riau Nomor : Kpls.307/IV/2018 Tentang Penetapan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Provinsi Riau;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Daftar Informasi Publik Wajib Di Sediakan Di Lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Provinsi Riau Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini
- KEDUA** : Daftar Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu terdiri atas informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, informasi yang wajib diumumkan secara serta merta, informasi di kecualikan dan informasi yang tersedia setiap saat;
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pekanbaru pada
tanggal 10 Januari 2026

a.n. Gubernur Riau
Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk
dan Keluarga Berencana Provinsi Riau,


Hj. FARIZA, S.H., M.H
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19661226 198701 2 003

Tembusan disampaikan kepada
Yth :

1. Gubernur Riau di Pekanbaru.
2. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau di Pekanbaru.
3. Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi Riau di Pekanbaru.

**DAFTAR INFORMASI PUBLIK
 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
 BERENCANA PROVINSI RIAU**

No.	Ringkasan Isi Informasi	Pejabat/ Unit/Satker yang menguasai Informasi	Penanggungjawab pembuatan atau penerbitan informasi	Waktu dan tempat pembuatan informasi	Bentuk informasi yang tersedia	Jangka Waktu Penyimpanan atau retensi Arsip
SEKRETARIAT						
1	Profil Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Riau	Sekretaris	Kepala Subbagian Kepegawaian dan Umum	Pekabaru, 2025	Cetak dan Web	aktif 2 tahun setelah masa berlaku dan setelah diperbaharui, inaktif 2 tahun. MUSNAH
2	Informasi Peraturan, Keputusan Kadis Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Sekretaris	Kepala Subbagian Kepegawaian dan Umum	Pekabaru, 2023-2025	Cetak	aktif 2 tahun setelah masa berlaku dan diperbaharui, inaktif 3 tahun. Permenan
3	Analisis Jabatan	Sekretaris	Kepala Subbagian Kepegawaian dan Umum	Pekabaru, 2025-2026	link SI-jabpr http://anjab nau.go.id	aktif 2 tahun setelah tahun anggaran selesai, inaktif 2 tahun. Permenan
4	Analisis Beban Kerja	Sekretaris	Kepala Subbagian Kepegawaian dan Umum	Pekabaru, 2025-2026	link SI-jabpr http://anjab nau.go.id	aktif 2 tahun setelah tahun anggaran selesai, inaktif 2 tahun. Permenan
5	Standar Kompetensi Jabatan	Sekretaris	Kepala Subbagian Kepegawaian dan Umum	Pekabaru, 2025	Soft File	aktif 2 tahun setelah tahun anggaran selesai, inaktif 2 tahun. Permenan
6	Daftar Urut Kepegawaian	Sekretaris	Kepala Subbagian Kepegawaian dan Umum	Pekabaru, 2025-2026	Cetak	aktif 1 tahun setelah data diperbaharui, inaktif 1 tahun. MUSNAH

No.	Ringkasan Isi Informasi	Pejabat Unit/Satker yang menguasai Informasi	Penanggungjawab pembuatan atau pemberian informasi	Waktu dan tempat pembuatan informasi	Bentuk informasi yang tersedia	Jangka Waktu Penyimpanan atau retensi Arsip
7	Laporan Keuangan 2023-2024 (Audited) Sekretaris	Kepala Subbagian Keuangan, Perencanaan dan Pengeloaan BMD	Kepala Subbagian Keuangan, Perencanaan dan Pengeloaan BMD	kanbaru, 2024	Soft File & Buku	2 Tahun Sejak Perda lenlang Pertanggungjawaban APBD Disahkan, inaktif 3 Tahun, Musnah
8	Peraturan Gubernur Riau No. 4 Tahun 2020 tentang : Perubahan atas peraturan Gubernur Riau nomor 58 tahun 2019 tentang penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2020.	Sekretaris	Kepala Subbagian Keuangan, Perencanaan dan Pengeloaan BMD	kanbaru, 2020	Cetak	aktif 1 Tahun setelah masa berlaku dan diperbaharui, inaktif 2 tahun, Permanaenen
9	Laporan BMD Semester I Tahun 2025	Sekretaris	Kepala Subbagian Keuangan, Perencanaan dan Pengeloaan BMD	kanbaru, 2025	Soft File & Buku	3 Tahun Setelah Proses Kegiatan Dipertanggungjawabkan, 7 Inaktif, Musnah
10	Daftar Arsip Inaktif yang Dipindahkan	Sekretaris	Unit Kearsipan	Pekanbaru, 2024-2025	Cetak	aktif 1 tahun sejak proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan, inaktif 1 tahun, MUSNAH

No.	Ringkasan Isi Informasi	Pejabat Unit/Satker yang menguasai Informasi	Penanggungjawab pembuatan atau pemberian informasi	Waktu dan tempat pembuatan informasi	Bentuk informasi yang tersedia	Jangka Waktu Penyimpanan atau retensi Arsip
11	Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Pemberdayaan, Perindugan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Riau 2018-2025	Sekretans	Fungsional Perencanaan Ahli Muda	Pekanbaru, 2018-2025	Soft File	aktif 1 tahun sejak proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan, inaktif 1 tahun, PERMANEN
12	Rencana Strategis	Sekretans	Fungsional Perencanaan Ahli Muda	Pekanbaru, 2019-2025	Soft File	aktif 2 tahun sejak proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan, inaktif 3 tahun, PERMANEN
13	Laporan Bulanan Realisasi Fisik dan Keuangan	Sekretans	Fungsional Perencanaan Ahli Muda	Pekanbaru, 2025	Cetak & Soft File	aktif 1 tahun sejak proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan, inaktif 1 tahun,

No.	Ringkasan Isi Informasi	Pejabat Unit/Satker yang menguasai Informasi	Penanggungjawab pembuatan atau pemberian informasi	Waktu dan tempat pembuatan informasi	Bentuk informasi yang tersedia	Jangka Waktu Penyimpanan atau retensi Arsip
14	DPA Tahun 2025-2026	Sekretaris	Fungsional Perencanaan Ahli Muda	kanbaru, 2025-26	Soft File	aktif 2 tahun sejak proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan, inaktif 3 tahun. PERMANEN
15	Indikator Kinerja Utama (IKU) 2021-2025	Sekretaris	Fungsional Perencanaan Ahli Muda	kanbaru, 2021-25	Soft File	aktif 2 tahun sejak proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan, inaktif 3 tahun. MUSNAH
16	Rencana Kerja 2021-2025	Sekretaris	Fungsional Perencanaan Ahli Muda	kanbaru, 2025	Soft File	aktif 2 tahun sejak proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan, inaktif 3 tahun. PERMANEN
17	Peraturan Gubernur Riau Nomor 16 Tahun 2021 tentang : Hubungan Kerja Dilingkungan Pemerintahan Provinsi Riau	Sekretaris	Kepala Subbagian Kepegawaian dan Umum	kanbaru, 2021	Cetak dan Web	aktif 2 tahun setelah masa berlaku dan diperbaharui, inaktif 5 tahun, MUSNAH
18	Surat Edaran Nomor 153/Se/Bkd/2021 tentang : Penyesuaian sistem kerja Aparatur Sipil Negara (ASN) mau pun tenaga honoror	Sekretaris	Kepala Subbagian Kepegawaian dan Umum	Pekanbaru, 2021	Cetak dan Web	aktif 2 tahun setelah masa berlaku dan diperbaharui, inaktif 5 tahun, MUSNAH
19	Peraturan Gubernur Riau Nomor 53 Tahun 2023 tentang kedudukan, susunan, organisasi dan Tata Kerja PD	Sekretaris	Kepala Subbagian Kepegawaian dan Umum	Pekanbaru, 2023	Cetak dan Web	aktif 2 tahun setelah masa berlaku dan diperbaharui, inaktif 5 tahun, MUSNAH

No.	Ringkasan Isi Informasi	Pejabat/ Unit/Satker yang menguasai Informasi	Penanggungjawab pembuatan atau penerbitan informasi	Waktu dan tempat pembuatan informasi	Bentuk informasi yang tersedia	Jangka Waktu Penyimpanan atau retensi Arsip
20	Peraturan Gubernur Riau Nomor 54 Tahun 2023 tentang system kerja	Sekretaris	Kepala Subbagian Kepegawaian dan Umum	Pekabaru, 2023	Cetak dan Web	aktif 2 Tahun setelah masa berlaku dan diperbaharui, inaktif 5 tahun. MUSNAH
BIDANG KELEMBAGAAN TUMBUH KEMBANG PEMENUHAN HAK ANAK						
21	DATA FORUM ANAK	Kepala Bidang KTRPHA	Fungsional Analis Kebijakan	Pekabaru, 2024-2026	Soft File, Cetak dan Web	aktif 2 Tahun setelah masa berlaku dan diperbaharui, inaktif 5 tahun. MUSNAH
BIDANG KELUARGA SEJAHTERA DATA DAN INFORMASI						
22	Jumlah Peserta KB, DATA CPR, NON MKJP, MKJP, UNMET NEED, POKTAN BINA KELUARGA BAITA, POKTAN BINA KELUARGA REMAJA, POKTAN BINA KELUARGA LANSIA, POKTAN PIR REMAJA, POKTAN UPPKA	Kepala Bidang KSDI	Fungsional Penata KKB	Pekabaru, 2024-2025	Soft File, Cetak dan Web	aktif 2 Tahun setelah masa berlaku dan diperbaharui, inaktif 5 tahun. MUSNAH
BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA						
23	GRAND DESIGN PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN PROVINSI RIAU	Kepala Bidang PPKB	Fungsional Penata KKB	Pekabaru, 2022-2025	Soft File, Cetak dan Web	aktif 2 Tahun setelah masa berlaku dan diperbaharui, inaktif 5 tahun. MUSNAH
24	PETA JALAN PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN (PUPK) PROVINSI RIAU	Kepala Bidang PPKB	Fungsional Penata KKB	Pekabaru, 2025	Soft File, Cetak dan Web	aktif 2 Tahun setelah masa berlaku dan diperbaharui, inaktif 5 tahun. MUSNAH
25	BUKU PEDOMAN AJAR SEKOLAH SIAGA KEPENDUDUKAN PROVINSI RIAU	Kepala Bidang PPKB	Fungsional Penata KKB	Pekabaru, 2025	Soft File, Cetak dan Web	aktif 2 Tahun setelah masa berlaku dan diperbaharui, inaktif 5 tahun. MUSNAH
BIDANG PERLINDUNGAH HAK PEREMPUAN DAN KHUSUS ANAK						
26	EVALUASI GT PP TPPO	Kepala Bidang PPKA	Fungsional Analis Kebijakan	Pekabaru, 2024-2025	Soft File, Cetak dan Web	aktif 2 Tahun setelah masa berlaku dan diperbaharui, inaktif 5 tahun. MUSNAH
27	REKAP DRPPA	Kepala Bidang PPKA	Fungsional Analis Kebijakan	Pekabaru, 2024-2026	Soft File, Cetak dan Web	aktif 2 Tahun setelah masa berlaku dan diperbaharui, inaktif 5 tahun. MUSNAH

No.	Ringkasan Isi Informasi	Pejabat/ Unit/Satker yang menguasai informasi	Penanggungjawab pembuatan atau pemberian informasi	Waktu dan tempat pembuatan informasi	Bentuk informasi yang tersedia	Jangka Waktu Penyimpanan atau retensi Arsip
-----	-------------------------	---	--	--------------------------------------	--------------------------------	---

BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KESETARAAN GENDER

28	GAP, GBS, KAK	Kepala Bidang PPKG	Fungsional Analis Kebijakan	Pekabaru, 2020-2025	Soft File, Cetak dan Web	aktif 2 tahun sejak proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan, inaktif 2 tahun. PERMANEN
----	---------------	--------------------	-----------------------------	---------------------	--------------------------	--

29	IPG, IDG	Kepala Bidang PPKG	Fungsional Analis Kebijakan	Pekabaru, 2020-2025	Soft File, Cetak dan Web	aktif 2 Tahun setelah masa berlaku dan diperbaharui, inaktif 5 tahun. MUSNAH
----	----------	--------------------	-----------------------------	---------------------	--------------------------	--

30	Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 tahun 2023 tentang Pengarusstaman Gender	Kepala Bidang PPKG	Fungsional Analis Kebijakan	Pekabaru, 2014-2025	Soft File, Cetak dan Web	Aktif
----	---	--------------------	-----------------------------	---------------------	--------------------------	-------

31	Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 tahun 2023 tentang Pengarusstaman Gender dalam Pembangunan Daerah	Kepala Bidang PPKG	Fungsional Analis Kebijakan	Pekabaru, 2023 - 2025	Soft File, Cetak dan Web	aktif 2 Tahun setelah masa berlaku dan diperbaharui, inaktif 5 tahun. MUSNAH
----	--	--------------------	-----------------------------	-----------------------	--------------------------	--

32	Presentase ARG OPD Tahun 2925	Kepala Bidang PPKG	Fungsional Analis Kebijakan	Pekabaru, 2025	Soft File, Cetak dan Web	Aktif 2 Tahun setelah masa berlaku dan diperbaharui, inaktif 5 tahun. MUSNAH
----	-------------------------------	--------------------	-----------------------------	----------------	--------------------------	--

UNIT PELAKSANA TEKNIS PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK

33	Data Kekeerasan Perempuan dan Anak	Kepala UPT PPA	Kasubag TU UPT PPA	Pekabaru, 2020-2025	Soft File, Cetak dan Web	aktif 2 Tahun setelah masa berlaku dan diperbaharui, inaktif 5 tahun. MUSNAH
----	------------------------------------	----------------	--------------------	---------------------	--------------------------	--

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

PROVINSI RIAU



NIP. 19661226 198701 2 003